

**RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BELITUNG
TAHUN 2024**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BELITUNG**

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 ini adalah sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 masih memuat gambaran keadaan masa depan (visi dan misi serta sasaran – sasaran strategis) yang ingin diwujudkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 untuk jangka waktu 1 (Satu tahun) dengan tetap memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul dalam lingkungan organisasi. Rencana Kerja ini akan menjadi pedoman oleh segenap aparatur di jajaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, mewujudkan visi dan misi Kabupaten serta menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan juga Rencana Operasional implementasi tugas pokok dan fungsi secara optimal.

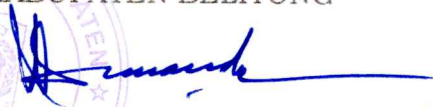
Rencana Kerja (RENJA) Perubahan sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja

Semoga Dokumen Renja Perubahan Tahun 2024 ini dapat bermanfaat sebagai peningkatan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung.

Tanjungpandan, Agustus 2024

KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BELITUNG




NURMAN SUNANDA, SE
NIP. 19650805 199403 1 006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Disebutkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2024.

Proses penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2024 sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu :

- Tahap persiapan penyusunan,
- Penyusunan rancangan awal,
- Penyusunan rancangan,
- Penyusunan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah,
- Perumusan rancangan akhir, dan
- Penetapan.

Bappeda Kabupaten Belitung menyusun Renja Perubahan Bappeda dengan berpedoman pada Renstra Bappeda Kabupaten Belitung, hasil evaluasi hasil Renja tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja tahun berjalan.

Proses penyusunan Renja Perubahan Bappeda Kabupaten Belitung Tahun 2024 didasarkan pada Renstra Bappeda Kabupaten Belitung dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Perubahan Tahun 2024. Tahun 2024 merupakan tahun ke-1 perencanaan pembangunan Kabupaten Belitung yang berpedoman pada RPD 2024-2026. Sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Belitung serta sejalan dengan visi rencana pembangunan daerah tahun 2024-2026 yaitu Adapun Visi dan Misi Kabupaten Belitung yaitu :

Visi : **“Mewujudkan ekonomi yang berkeadilan, berdaya saing dan inovatif di Kabupaten Belitung Tahun 2024”**

Makna yang terkandung didalam pernyataan visi tersebut, adalah sebagai berikut

- Ekonomi Berkeadilan bermakna bahwa pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Belitung harus dapat dialokasikan dan didistribusikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan yang dilakukan harus memperhatikan hak-hak dasar masyarakat serta memperluas kemampuan masyarakat untuk dapat mengakses seluruh sumber daya;
- Berdaya saing bermakna bahwa pembangunan di Kabupaten Belitung sanggup berkompetisi dengan daerah lain, memiliki keunggulan dan mempunyai nilai tambah di tingkat nasional maupun internasional;
- Inovatif mengandung makna bahwa pembangunan di Kabupaten Belitung harus memiliki pembaharuan dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan.

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka ditetapkan Misi sebagai berikut :

Misi Kesatu Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan.

Misi Kedua Meningkatkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan.

Misi Ketiga Meningkatkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

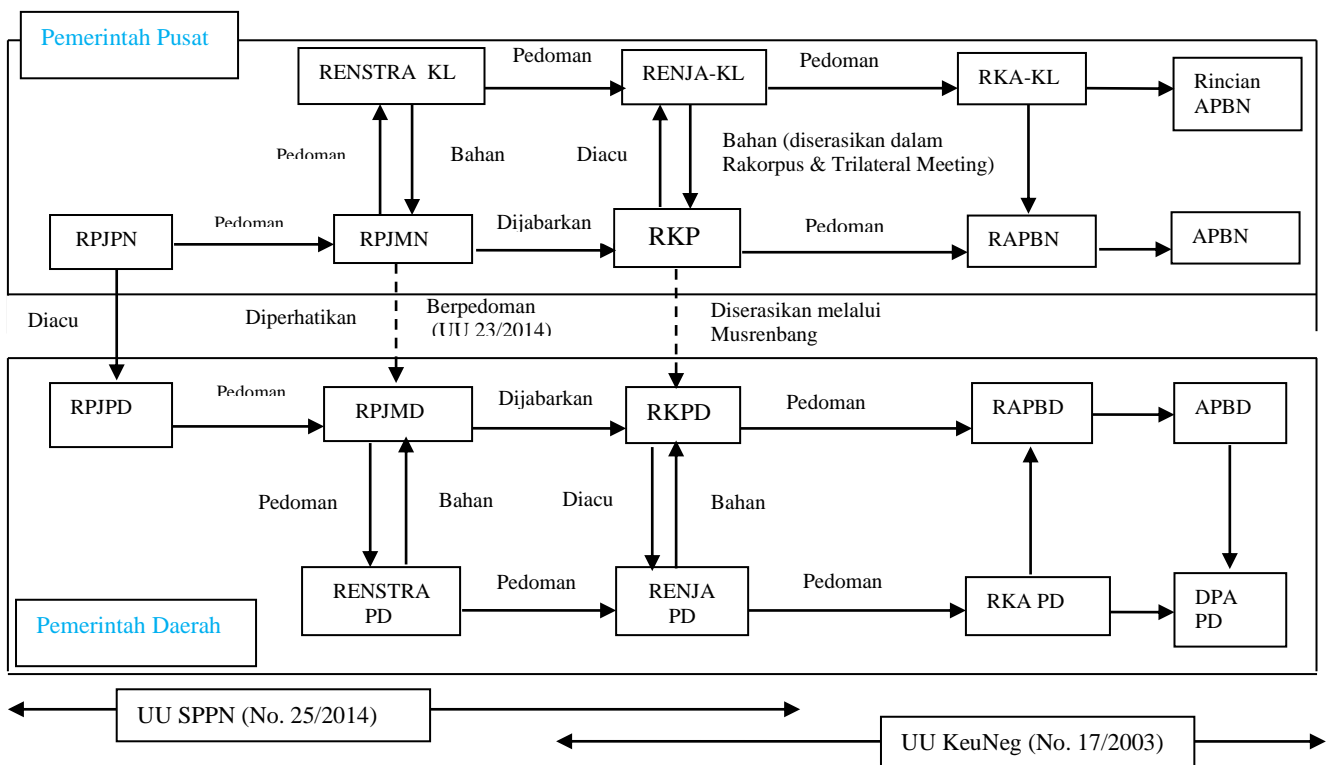
Dalam hal ini, Bappeda Kabupaten Belitung berada dalam Misi kedua yaitu **“Meningkatkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan”**, dengan tujuan **“Terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan”** dan sasaran **“Terciptanya Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel”** serta Indikator Sasaran **“ Opini BPK dan Nilai SAKIP”**

Selanjutnya Renja Perubahan Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran (RKA) Perubahan Perangkat Daerah dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten.

Dokumen Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun, yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan (pagu indikatif) yang termuat sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman dan selaras dengan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Dokumen Renja ini akan menjadi pedoman Bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran Perubahan dan selanjutnya akan menjadi bahan dalam proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Berikut gambaran keterkaitan antara Renstra, Renja dan RKPD dalam proses Penyusunan APBD



Dengan demikian dapat dimaknai bahwa keberadaan dokumen Rencana Kerja Perubahan sangat penting bagi Perangkat Daerah dalam menentukan arah kebijakan dan proyeksi anggaran. Dengan disusunnya dokumen rencana kerja Perubahan maka tahapan kebijakan yang dimulai dengan formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi menjadi optimal dalam upaya akselerasi program pembangunan.

Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. Pergeseran pagu kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan kelompok indikator sub kegiatan.

Mengingat sumberdaya yang terbatas maka usulan usulan dalam perubahan Renja Perangkat Daerah memerlukan kajian lebih lanjut agar dapat ditentukan prioritas. Penentuan kegiatan prioritas dilaksanakan dengan menyaring usulan-usulan agar selaras dengan kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan pemerintah Kabupaten Belitung. Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dijadikan acuan dalam menyusun Rencana kerja Perubahan dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Perangkat Daerah yang selanjutnya akan diproses menjadi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P)

1.2 Landasan Hukum

Dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55),
2. Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera

- Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi, Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Kepmendagri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenkelatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah
16. Keputusan Menteri Dalam negeri No. 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang perubahan atas keputusan Menteri Dalam Menteri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenkelatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 seri E);

18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 4 seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2010 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2014 - 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 47);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 54);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023;
25. Peraturan Bupati Belitung Nomor 24A Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023;
26. Peraturan Bupati Belitung Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 24A Tahun 2019 tentang

- Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023;
27. Peraturan Bupati Belitung Nomor 75 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023
 28. Peraturan Bupati Belitung Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan IKU Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023
 29. Peraturan Bupati Belitung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Belitung No. 24A Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023;

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Organisasi Perangkat Daerah serta mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan.

Sedangkan Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tahun 2024 yaitu :

- a. Menyediakan Dokumen Perencanaan Tahunan Bappeda Kabupaten Belitung
- b. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2024;
- c. Sebagai Dokumen Perencanaan yang akan dilaksanakan tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- d. Untuk menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2024, agar sejalan dengan target-target pembangunan yang harus dijalankan/direalisasikan sesuai dengan tugas pokok.

- e. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

TRIWULAN KE II TAHUN 2024

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERUBAHAN BAPPEDA KABUPATEN BELITUNG TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi hasil Capaian Kinerja Pelayanan SKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, telah dibentuk tim penyusun Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Bappeda Kabupaten Belitung Tahun 2024. Tim yang dibentuk telah melakukan evaluasi yang meliputi realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Evaluasi RKPD yang dilakukan bertujuan untuk melihat perkembangan hasil pelaksanaan RKPD dan keselarasan antara APBD dengan RKPD serta memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah dalam menyusun rancangan kebijakan. Evaluasi RKPD triwulan II Tahun Anggaran 2024 didasarkan kepada pencapaian kinerja pembangunan sampai dengan kondisi 30 Juni 2024. Sebagai dokumen evaluasi perencanaan pembangunan tahunan selama tahun berjalan, diharapkan hasil evaluasi ini dapat menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Tahun 2024

Evaluasi pelaksanaan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 menguraikan tentang hasil evaluasi Renja Perubahan tahun berjalan 2024, selain itu juga memperhatikan dokumen Renstra sebagai bahan acuan. Sedangkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah menguraikan pencapaian kinerja. Analisis Capaian Kinerja Pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung untuk target renstra SKPD telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Belitung.

Sampai dengan triwulan II penyerapan anggaran Bappeda Kabupaten Belitung masih relatif rendah dibandingkan dengan target yang seharusnya dicapai. Adanya kebijakan pembatasan kegiatan baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung maupun pada institusi pelaksana/mitra kerja menyebabkan pelaksanaan kegiatan tidak dapat berjalan optimal dan anggaran tidak dapat terserap sesuai yang direncanakan.

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Bappeda Kabupaten Belitung Tahun 2024 mengacu pada pencapaian Indikator yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026. Pada Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Belitung Tahun 2024 terdapat 4 (empat) Program, 14 (empat belas) Kegiatan, dan 40 (empat puluh) Sub Kegiatan sesuai dengan nomenklatur pada lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang dilaksanakan untuk mencapai target yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah tahun ke-5. Rencana Kerja tersebut kemudian berubah menjadi 4 (empat) Program, 14 (empat belas) Kegiatan, dan 40 (empat puluh) Sub Kegiatan pada Renja Perubahan Bappeda Kabupaten Belitung tahun 2024, yang juga mengalami perubahan indikator kinerja pada sub kegiatan untuk menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam negeri No. 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang perubahan atas keputusan Menteri Dalam Menteri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Selain itu target capaian kinerja pada program dan kegiatan juga mengalami perubahan untuk penyesuaian anggaran dan realisasi fisiknya.

Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2024 dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2024 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel berikut ini :

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2024

TRIWULAN II

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		13=12/7x100%		14 = 6 + 12			15=14/5 x100%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Semua Bidang																									
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan (persen)	100,00		100,00		100								100		100,00%		100,00					Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
			Indeks profesionalitas ASN Perangkat Daerah (persen)	75,00		75,00		75	9.286.160,088	1.647.103,437		2.779,587.179				75	4.426.690,616	100,00%	47,67%	75,00		13.026.811.491		0,00%	
			Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah (persen)	100,00		100,00		100								100		100,00%		100,00					
			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur (persen)	100,00		100,00		100								100		100,00%		100,00					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen hasil perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	-	0,00	6.400,800		9	6.755.000	4	-	-	-	-	-	4	-	44,44%	0,00%	4,00		6.400,800	0,00%	0,00%	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	-	0,00	1.320,000		2	1.400.000	1	-	-	-			1	-	50,00%	0,00%	1,00		1.320,000	0,00%	0,00%	

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		-	0,00	4.997.400	2	6.252.600	-	-	1	4.103.300							1	4.103.300	50,00%	65,63%	1,00	9.100.700	0,00%	0,00%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah (Orang)		-	0,00	113.474.708	8	152.161.488	1	13.001.286	-	12.408.620							1	25.409.906	12,50%	16,70%	1,00	138.884.614	0,00%	0,00%
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)		-	0,00	18.620.000	1	20.535.000	-	-	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	18.620.000	0,00%	0,00%
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		-	0,00	4.961.664	30	30.200.000	-	-	-	12.408.620							-	12.408.620	0,00%	41,09%	0,00	17.370.284	0,00%	0,00%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		-	0,00	89.893.044	8	101.426.488	1	13.001.286	-	-							1	13.001.286	12,50%	12,82%	1,00	102.894.330	0,00%	0,00%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah (Persen)		-	0,00	808.751.482	100	957.529.600	25	133.023.240	25	222.288.787							50	355.312.027	50,00%	37,11%	50,00	1.164.063.509	0,00%	0,00%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		-	0,00	19.628.300	1	35.000.000	1	-	1	11.990.000							1	11.990.000	50,00%	34,26%	0,50	31.618.300	0,00%	0,00%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		-	0,00	85.188.000	2	101.472.100	2	-	2	24.501.500							1	24.501.500	50,00%	24,15%	1,00	109.689.500	0,00%	0,00%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		-	0,00	13.965.100	1	16.000.000	1	-	1	3.290.000							1	3.290.000	50,00%	20,56%	0,50	17.255.100	0,00%	0,00%

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		-	0,00	268.793.095	2	417.307.500	2	80.152.500	2	64.395.000				1	144.547.500	50,00%	34,64%	1,00	413.340.595	0,00%	0,00%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		-	0,00	50.000.000	1	78.750.000	1	-	1	18.697.400				1	18.697.400	50,00%	23,74%	0,50	68.697.400	0,00%	0,00%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		-	0,00	7.760.000	1	9.000.000	1	1.440.000	1	2.010.000				1	3.450.000	50,00%	38,33%	0,50	11.210.000	0,00%	0,00%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		-	0,00	363.416.987	12	300.000.000	3	51.430.740	3	97.404.887				6	148.835.627	50,00%	49,61%	6,00	512.252.614	0,00%	0,00%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis barang milik daerah (Jenis)		-	0,00	97.274.800	5	142.500.000	-	-	-	-				-	-	0,00%	0,00%	0,00	97.274.800	0,00%	0,00%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		-	0,00	97.274.800	10	142.500.000	-	-	-	-				-	-	0,00%	0,00%	0,00	97.274.800	0,00%	0,00%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran (Persen)		-	0,00	372.067.961	100	420.297.400	25	77.309.424	25	89.819.015				50	167.128.439	50,00%	39,76%	50,00	539.196.400	0,00%	0,00%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		-	0,00	1.709.000	12	4.050.000	3	-	3	261.000				6	261.000	50,00%	6,44%	6,00	1.970.000	0,00%	0,00%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		-	0,00	138.111.561	12	184.000.000	3	38.601.524	3	31.496.165				6	70.097.689	50,00%	38,10%	6,00	208.209.250	0,00%	0,00%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		-	0,00	232.247.400	12	232.247.400	3	38.707.900	3	58.061.850				6	96.769.750	50,00%	41,67%	6,00	329.017.150	0,00%	0,00%

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

	Pelaksanaan Konsultasi Publik	*Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)		-	0,00	19.386.000	2	40.677.500	2	29.701.100	-	-					2	29.701.100	100,00%	73,02%	2,00	49.087.100	0,00%	0,00%
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	*Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)		-	0,00	64.065.450	2	84.800.000	1	-	-	16.427.000					1	16.427.000	50,00%	19,37%	1,00	80.492.450	0,00%	0,00%
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	*Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)		-	0,00	43.062.015	2	99.500.000	1	610.500	-	52.293.500					1	52.904.000	50,00%	53,17%	1,00	95.966.015	0,00%	0,00%
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	*Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)		-	0,00	9.137.000	5	15.000.000	5	8.575.000	-	4.450.000					5	13.025.000	100,00%	86,83%	5,00	22.162.000	0,00%	0,00%
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)		-	0,00	128.750.220	2	198.803.200	-	46.362.368	-	31.736.682					-	78.099.050	0,00%	39,28%	0,00	206.849.270	0,00%	0,00%
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah (Dokumen)		-	0,00	148.873.375	1	153.166.455	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	148.873.375	0,00%	0,00%
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	*Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)		-	0,00	148.873.375	82	153.166.455	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	148.873.375	0,00%	0,00%
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah (Dokumen)		-	0,00	151.932.389	4	251.290.400	1	40.550.880	-	65.315.330					1	105.866.210	25,00%	42,13%	1,00	257.798.599	0,00%	0,00%

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

		program perencanaan pembangunan daerah (%)																					
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Laporan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia (Laporan)		-	0,00	21.871.000	8	231.690.766	2	10.166.000	2	31.568.500	-	-	4	41.734.500	50,00%	18,01%	4,00	63.605.500	0,00%	0,00%	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)		-	0,00	-	4	48.098.300	1	10.166.000	1	5.459.000			2	15.625.000	50,00%	32,49%	2,00	15.625.000	0,00%	0,00%	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)		-	0,00	21.871.000	4	183.592.466	1	-	1	26.109.500			2	26.109.500	50,00%	14,22%	2,00	47.980.500	0,00%	0,00%	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Laporan koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) (Laporan)		-	0,00	16.206.350	1	67.589.239	-	2.567.000	-	5.979.000	-	-	-	8.546.000	0,00%	12,64%	0,00	24.752.350	0,00%	0,00%	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan	*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA		-	0,00	16.206.350	1	67.589.239	-	2.567.000	-	5.979.000	-	-	-	8.546.000	0,00%	12,64%	0,00	24.752.350	0,00%	0,00%	

Dari data tersebut, evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Bappeda Kabupaten Belitung dan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut :

Urusan Perencanaan :

➤ **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Berdasarkan Rencana Kerja Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 pada program ini terdapat 7 (tujuh) kegiatan dari 26 (dua puluh enam) sub kegiatan yang direncanakan yaitu :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dari kegiatan yang direncanakan tersebut telah dapat dilaksanakan dengan baik dengan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 Triwulan II mencapai 47,96% untuk capaian Kinerja dan 47,67% untuk capaian Anggaran selama periode Triwulan ke II tahun 2024.

➤ **Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**

Berdasarkan Rencana Kerja Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 pada program ini terdapat 3 (Tiga) kegiatan dari 9 (Sembilan) Sub Kegiatan yang direncanakan yaitu :

1. Kegiatan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
2. Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik
3. Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD Lintas SKPD

4. Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
5. Kegiatan Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
6. Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota
7. Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD
8. Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
9. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Dari program dan kegiatan yang direncanakan tersebut telah dapat dilaksanakan dengan baik dan dengan tingkat realisasi 16,37% untuk capaian Kinerja dan 20,96% untuk capaian anggaran selama periode triwulan II tahun 2024. Kegiatan yang belum terlaksana adalah kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan dengan sub kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik, Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD Lintas SKPD, Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota dan Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang kecamatan yang mana kegiatan ini baru dilaksanakan di Triwulan II Tahun 2024

➤ **Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**

Berdasarkan Rencana Kerja Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan dari 4 (Empat) Sub Kegiatan yang direncanakan yaitu :

1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
3. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Dari program dan kegiatan yang direncanakan tersebut telah dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai output yang diinginkan dengan

tingkat realisasi sebesar 33,12% untuk realisasi Kinerja dan 18,56% untuk realisasi anggarannya.

➤ **Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**

Berdasarkan Rencana Kerja Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yang direncanakan yaitu :

1. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Dari program dan kegiatan yang direncanakan tersebut telah dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai output yang diinginkan dengan tingkat realisasi masih rendah yaitu sebesar 0,00% untuk realisasi Kinerja dan 27,16% untuk realisasi anggarannya. Sedangkan dari capaian Rencana Strategis telah memenuhi sesuai dengan kerangka pencapaiannya. Untuk kegiatan lain yang ada di program tersebut sudah terlaksana dan sudah terealisasi hanya dibagian realisasi kinerja atau fisik belum terealisasi dikarenakan target sub kegiatannya adalah Dokumen yang baru mencapai realisasi/ hasil pada bulan Desember yaitu di akhir periode tahun kegiatan. Sedangkan dari capaian Rencana Strategis telah memenuhi sesuai dengan kerangka pencapaiannya.

Berubahnya beberapa kebijakan, berubahnya nama kegiatan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Tim Evaluasi RAPBD Kabupaten Belitung.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada dokumen Perubahan Ketiga Renstra Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 telah ditetapkan sejumlah sasaran pelayanan Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Belitung di bidang Urusan Perencanaan beserta target indikator kerjanya, dimana pencapaiannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Belitung dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan seiring dengan misi yang dimiliki oleh Kepala Daerah terpilih, sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah (RPJMD). Ketercapaian tujuan dan sasaran yang dimaksud dapat terlihat dari indikator kinerja Renstra Bappeda Kabupaten Belitung. Tingkat

ketercapaian kinerja Bappeda Kabupaten Belitung berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis tersebut, dapat dilihat dari tabel berikut : (Tabel 1)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Belitung Berdasarkan Indeks Kinerja Utama Tahun 2019 - 2023

No	Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi SKPD	Target Renstra SKPD Tahun ke (%)					Realisasi Capaian Tahun Ke (%)					Rasio Pencapaian tahun ke (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
I	Indikator Tujuan dan Sasaran															
1	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Evaluasi SAKIP Kabupaten Belitung	100	100	30	30	30	62,77	73,9	22,46	-	-	62,77	73,9	74,86	-	-
2	Persentase Ketercapaian Sasaran Pembangunan Daerah	100	100	100	100	100	96,6	75,72	60	50	-	96,6	75,72	60	50	-
3	Persentase Rekomendasi Kelitbangan yang diterapkan		40	60	80	100		71,43	68	67,07	-		178,6	113,3	83,83	-
II	Indikator Program															
1	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan			100	100	100			100	100	n/a			100	100	n/a
2	Indeks profesionalitas ASN perangkat daerah			75	75	75			65,96	71,32	n/a			87,94	95,08	n/a
3	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah			100	100	100			100	100	n/a			100	100	n/a
4	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur			100	100	100			100	100	n/a			100	100	n/a
5	Persentase (%) kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan			100	100	100			99,35	91,02	n/a			99,35	91,02	n/a
6	Persentase (%) kesesuaian program dokumen perencanaan perangkat daerah mitra bidang pembangunan sosial budaya dan pemerintahan dengan program perencanaan			100	100	100			100	100	n/a			100	100	n/a
7	Persentase (%) kesesuaian program dokumen perencanaan perangkat daerah mitra bidang ekonomi dan sumber daya alam dengan program perencanaan pembangunan			100	100	100			100	100	n/a			100	100	n/a
8	Persentase (%) kesesuaian program dokumen perencanaan perangkat daerah mitra bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah dengan program perencanaan			100	100	100			95,35	97,67	n/a			95,35	97,67	n/a
9	Persentase (%) hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai rekomendasi kebijakan pembangunan daerah			60	80	100			68	67,07	n/a			166,6	83,83	n/a

. Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratis menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional.

Dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan dan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- Pembinaan dan pelaksanaan terhadap tugas-tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;

- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- Pelaksanaan administrasi badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya rumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah, penelitian

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan Peraturan Bupati No. 60 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung mempunyai kedudukan melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai perencanaan pembangunan daerah, Bappeda bertanggung jawab dalam perumusan konsep dalam penyelesaian masalah-masalah pembangunan dimasa sekarang dan yang akan datang di daerah dengan mengacu pada RPJPD, RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 dan RPD Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 serta memperhatikan aspirasi, kondisi obyektif perkembangan dan kebutuhan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappeda dalam memberikan pelayanan senantiasa mampu menyesuaikan dengan lingkungan internal maupun eksternal dan aspiratif bagi pengguna layanan. Oleh karena itu perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan merupakan bagian dari perencanaan yang tidak boleh diabaikan.

Permasalahan pelayanan Bappeda Kabupaten Belitung yang teridentifikasi berdasarkan peta masalah adalah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : (Tabel 2)

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum selarasnya perencanaan pembangunan	Ketidak selarasnya dokumen perencanaan pembangunan yang disusun baik internal Bappeda maupun PD terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya penerapan system perencanaan berbasis elektronik yang terintegrasi. 2. Belum terintegrasinya perencanaan dengan penganggaran sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak tereduksi di dalam proses penganggaran
2	Kualitas dokumen perencanaan yang dihasilkan belum cukup baik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak selarasnya Dokumen Rentra Perangkat Daerah dengan RPJMD; 2. Masih terdapat inkonsistensi antara dokumen RPJMD dengan RKPD 3. Belum optimalnya koordinasi antara Bappeda dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran; 4. Alokasi pagu indikatif yang dirumuskan belum selaras dengan prioritas program kegiatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurang Optimalnya Koordinasi antara Bappeda dan Perangkat Daerah 2. Dinamika pembangunan yang cepat mengalami perubahan menyebabkan relevansi substansi pada dokumen RPJMD dengan kondisi terkini menjadi tidak selaras lagi. 3. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, untuk melakukan perencanaan dan pengendalian pembangunan
3	Kurangnya Data dan informasi yang akurat untuk penyusunan perencanaan		Data dan informasi OPD Kurang Akurat
4	Kurangnya Kompetensi SDM dibidang Perencanaan	Tata cara penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan belum sepenuhnya mengikuti kaidah-kaidah sebagaimana yang telah diatur di dalam aturan	Kurangnya Pemahaman ASN terhadap mekanisme penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan.

Kurangnya kajian ilmiah yang dapat digunakan dalam pembuatan kebijakan		Sedikitnya kajian dan penelitian serta kerja sama penelitian dan pengembangan dengan lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan ditingkat regional maupun nasional untuk menunjang perencanaan
Belum optimalnya pengembangan inovasi daerah dan penerapannya		

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Renja Perubahan Bappeda Kabupaten Belitung tahun 2024 merupakan Dokumen Perencanaan Bappeda Tahunan yang berdasarkan perubahan RKPD tahun 2024. Proses penyusunan RKPD-P tahun 2024 berlandaskan pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan rencana kerja pemerintah sebagaimana tertuang pada RPD kabupaten Belitung tahun 2024-2026. Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman bagi bappeda Kabupaten Belitung dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Penyusunan dokumen Renja Perubahan tahun 2024 dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan mempertimbangkan berbagai isu dan permasalahan yang mempengaruhi proses pelaksanaan Program dan Kegiatan Bappeda pada tahun berjalan. Perubahan tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan upaya pencapaian target dan sasaran Renstra Bappeda tahun 2024-2026.

Sesuai hasil evaluasi, Renja Perubahan Bappeda Kabupaten Belitung tahun 2024 lebih memuat berbagai perubahan dan pergeseran anggaran tanpa adanya penambahan kegiatan yang ada. Pergeseran anggaran tersebut terjadi karena adanya perubahan volume kegiatan maupun optimalisasi pemanfaatan dana silpa kegiatan yang telah dilaksanakan. Selain itu pergeseran anggaran juga dimaksudkan sebagai upaya optimalisasi pengelolaan anggaran Bappeda Kabupaten Belitung sehingga seluruh target dan sasaran dapat tercapai.

Rumusan program dan kegiatan Rencana Kerja Perubahan Bappeda Kabupaten Belitung tahun 2024, terlihat dalam tabel sebagai berikut:

(tabel 3)

**RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAKET PEKERJAAN	PLAFOND ANGGARAN		REALISASI			SISA ANGGARAN			
					INDUK	PERUBAHAN	KEUANGAN (Rp)	KEU (%)	FISIK (%)	RUPIAH (Rp)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	13	14	15	16	17		
1	Program Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	1.400.000	1.400.000	-	0,0	50,0	1.400.000	100,0
						Sub Total	1.400.000	1.400.000	0	0,0	50,0	1.400.000	100,0
			2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	1.050.000	1.050.000	-	0,0	0	1.050.000	100,0
						Sub Total	1.050.000	1.050.000	0	0,0	0,0	1.050.000	100,0
			3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	1.050.000	1.050.000	-	0,0	0	1.050.000	100,0
						Sub Total	1.050.000	1.050.000	0	0,0	0,0	1.050.000	100,0
			4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	1.050.000	1.050.000	-	0,0	50,0	1.050.000	100,0
						Sub Total	1.050.000	1.050.000	0	0,0	50,0	1.050.000	100,0
			5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	1.050.000	1.050.000	-	0,0	0	1.050.000	100,0
						Sub Total	1.050.000	1.050.000	0	0,0	0,0	1.050.000	100,0
			6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.155.000	1.155.000	-	0,0	36,0	1.155.000	100,0

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

				Sub Total	1.155.000	1.155.000	0	0,0	36,0	1.155.000	100,0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1	Belanja Gaji Pokok PNS	1.858.082.900	1.985.130.073	1.105.769.908	59,5	57,1	845.912.421	40,5
			2	Belanja Gaji Pokok PPPK	158.504.003	108.922.386	51.257.586	32,3	57,1	107.246.417	67,7
			3	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	183.769.000	192.433.902	106.343.076	57,9	57,1	77.425.924	42,1
			4	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	23.352.000	6.279.056	3.588.032	15,4	57,1	19.763.968	84,6
			5	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	176.900.000	122.150.000	69.800.000	39,5	57,1	107.100.000	60,5
			6	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	171.220.000	186.060.000	101.920.000	59,5	57,1	69.300.000	40,5
			7	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	30.240.000	18.360.000	8.640.000	28,6	57,1	21.600.000	71,4
			8	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	21.158.000	22.050.000	12.030.000	56,9	57,1	9.128.000	43,1
			9	Belanja Tunjangan Beras PNS	113.590.000	105.443.520	59.384.400	52,3	57,1	54.205.600	47,7
			10	Belanja Tunjangan Beras PPPK	16.240.000	5.503.920	2.896.800	17,8	57,1	13.343.200	82,2
			11	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	10.964.000	5.521.071	2.686.676	24,5	57,1	8.277.324	75,5
			12	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	4.144.000	0	0	0,0	57,1	4.144.000	100,0
			13	Belanja Pembulatan Gaji PNS	29.600	29.343	17.439	58,9	57,1	12.161	41,1
			14	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	5.600	1.160	584	10,4	57,1	5.016	89,6
			15	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	195.188.000	220.511.566	85.619.480	43,9	57,1	109.568.520	56,1
			16	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	11.704.000	6.785.520	2.371.528	20,3	57,1	9.332.472	79,7
			17	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.582.200	4.041.859	1.991.221	43,5	57,1	2.590.979	56,5

		18	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	403.200	230.670	92.268	22,9	57,1	310.932	77,1		
		19	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	13.510.000	12.125.665	5.973.691	44,2	57,1	7.536.309	55,8		
		20	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	94.8770	691.980	276.792	29,2	57,1	671.978	70,8		
		21	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	9.337.100	9.925.650	0	0,0	57,1	9.337.100	100,0		
		22	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	796.627	544.612	0	0,0	57,1	796.627	100,0		
		23	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	4.351.800.000	4.492.213.047	2.208.584.113	50,8	50,0	2.143.215.887	49,2		
		24	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	72.800.000	44.174.000	16.874.000	23,2	50,0	55.926.000	76,8		
			Sub Total	7.429.269.000	7.549.129.000	3.846.117.594	51,8	57,1	3.583.151.406	48,2		
	2	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.000.000	1.500.000	980.500	98,1	98,1	19.500	2,0	
			2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	606.600	1.348.000	603.000	99,4	99,4	3.600	0,6	
			3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.646.000	5.404.500	2.519.800	54,2	54,2	2.126.200	45,8	
			Sub Total	6.252.600	8.252.500	4.103.300	65,6	65,6	2.149.300	34,4		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	20.535.000	20.535.000	-	0,0	0	20.535.000	100,0
			Sub Total	20.535.000	20.535.000	0	0,0	0,0	20.535.000	100,0		
	2	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	30.200.000	50.200.000	12.408.620	41,1	41,1	17.791.380	58,9	

			Sub Total	30.200.000	50.200.000	12.408.620	41,1	41,1	17.791.380	58,9	
	3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1	Belanja Bimbingan Teknis	56.000.000	56.000.000	7.000.000	12,5	25,0	49.000.00	87,5
			2	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	45.426.488	45.426.488	6.001.286	13,2	25,0	39.425.202	86,8
			Sub Total	101.426.488	101.426.488	13.001.286	12,8	25,0	88.425.202	87,2	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	35.000.000	35.000.000	11.990.000	34,3	34,3	23.010.000	65,7
			Sub Total	35.000.000	35.000.000	11.990.000	34,3	34,3	23.010.000	65,7	
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	50.000.000	50.000.000	12.348.500	24,7	24,7	31.169.100	75,3
			2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	40.472.100	40.472.100	9.303.000	23,0	23,0	8.150.000	77,0
			3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	11.000.000	11.000.000	2.850.000	25,9	25,9	12.710.000	74,1
			Sub Total	101.472.100	101.472.100	29.251.600	28,8	28,8	76.970.600	71,2	
	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	16.000.000	16.000.000	3.290.000	20,6	45,0	12.710.000	79,4
			Sub Total	16.000.000	16.000.000	3.290.000	20,6	45,0	12.710.000	79,4	
	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	311.107.500	311.107.500	117.787.500	37,9	37,9	193.320.000	62,1
			2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	54.000.000	54.000.000	20.440.000	37,9	37,9	33.560.000	62,1
3			Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	25.700.000	30.700.000	5.814.000	22,6	22,6	19.886.000	77,4	
4			Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	10.000.000	10.000.000	-	0,0	0,0	10.000.000	100,0	
5			Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	16.500.000	16.500.000	-	0,0	0,0	16.500.000	100,0	
		Sub Total	417.307.500	422.307.500	144.041.500	34,5	34,5	246.766.000	65,5		

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	78.750.000	78.750.000	18.697.400	23,7	33,3	60.052.600	76,3
				Sub Total	78.750.000	78.750.000	18.697.400	23,7	33,3	60.052.600	76,3
	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	9.000.000	9.000.000	3.450.000	38,3	38,3	5.550.000	61,7
				Sub Total	9.000.000	9.000.000	3.450.000	38,3	38,3	5.550.000	61,7
	7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	300.000.000	400.000.000	148.835.627	49,6	49,6	151.164.373	50,4
				Sub Total	300.000.000	400.000.000	148.835.627	49,6	49,6	151.164.373	50,4
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Pengadaan Mebel	1	Belanja Modal Mebel	0	40.515.000	-	0,0	0	0	-
				Sub Total	0	40.515.000	0	0,0	0,0	76.035.000	-
	2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Belanja Modal Electric Generating Set	0	61.050.000	-	0,0	0	0	-
			2	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0	52.000.000	-	0,0	0	0	-
			3	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	0	15.262.500	-	0,0	0	0	-
			4	Belanja Modal Alat Pendingin	6.000.000	12.000.000	-	0,0	0	6.000.000	100,0
			5	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	45.000.000	86.760.000	-	0,0	0	45.000.000	100,0
			6	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	0	4.440.000	-	0,0	0	0	-
			7	Belanja Modal Personal Computer	54.000.000	431.800.000	-	0,0	0	54.000.000	100,0
			8	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	37.500.000	82.500.000	-	0,0	0	37.500.000	100,0
				Sub Total	142.500.000	745.812.500	0	0,0	0,0	142.500.000	100,0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.450.000	1.450.000	-	0,0	0	1.450.000	100,0
			2	Belanja Paket/Pengiriman	2.600.000	2.600.000	261.000	10,0	10,0	2.339.000	90,0

Pemerintahan Daerah			Sub Total	4.050.000	4.050.000	448.000	11,1	11,1	3.789.000	88,9	
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Belanja Tagihan Telepon	10.000.000	10.000.000	3.725.990	37,3	37,3	6.274.010	62,7
			2	Belanja Tagihan Listrik	129.000.000	129.000.000	51.789.599	40,1	40,1	77.210.401	59,9
			3	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	45.000.000	45.000.000	14.582.100	32,4	32,4	30.417.900	67,6
				Sub Total	184.000.000	184.000.000	70.097.689	38,1	38,1	113.902.311	61,9
	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	99.000.000	99.000.000	41.250.000	41,7	41,7	57.750.000	58,3
			2	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	66.000.000	66.000.000	27.500.000	41,7	41,7	38.500.000	58,3
			3	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	33.000.000	33.000.000	13.750.000	41,7	41,7	19.250.000	58,3
			4	Belanja Jasa Tenaga Supir	33.000.000	33.000.000	13.750.000	41,7	41,7	19.250.000	58,3
			5	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	554.400	554.400	231.000	41,7	41,7	323.400	58,3
	6		Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	693.000	693.000	288.750	41,7	41,7	404.250	58,3	
			Sub Total	232.247.400	232.247.400	96.769.750	41,7	41,7	135.477.650	58,3	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	18.410.000	18.410.000	3.549.800	19,3	19,3	14.860.200	80,7
			2	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	26.000.000	26.000.000	-	0,0	0,0	26.000.000	100,0
			3	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	65.000.000	65.000.000	2.180.000	3,4	3,4	62.820.000	96,6
			4	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	74.340.000	74.340.000	15.008.550	20,2	20,2	59.331.450	79,8
				Sub Total	183.750.000	183.750.000	20.738.350	11,3	11,3	163.011.650	88,7

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

			2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	8.550.000	8.550.000	4.329.000	50,6	50,6	4.221.00	49,4
					2	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	0	49.950.000	-	0,0	0,0	0	-
					3	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	10.200.000	10.200.000	3.552.000	34,8	34,8	6.648.000	65,2
					4	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	6.500.000	9.750.000	-	0,0	0,0	6.500.000	100,0
						Sub Total	25.250.000	78.450.000	7.881.000	31,2	31,2	17.369.000	68,8
			3	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor	150.071.000	150.071.000	-	0,0	0,0	150.071.000	100,0
						Sub Total	150.071.000	150.071.000	0	0,0	0,0	150.071.000	100,0
2	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.000.000	5.000.000	-	0,0	0,0	5.000.000	-
					2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.480.000	1.480.000	-	0,0	0,0	1.480.000	-
					3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	15.942.500	9.500.000	-	0,0	0,0	9.500.000	-
					4	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	61.050.000	22.200.000	-	0,0	0,0	22.200.000	-
					5	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	12.600.000	12.600.000	-	0,0	0,0	12.600.000	-
					6	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	500.000.000	300.000.000	-	0,0	0,0	500.000.000	100,0
					7	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	75.000.000	75.000.000	21.412.560	28,6	28,6	53.587.440	71,4
						Sub Total	671.072.500	425.780.000	21.412.560	3,2	3,2	449.659.940	96,8

2	Pelaksanaan Konsultasi Publik	1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0	93,2	-	0,0
		2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	740.000	740.000	640.000	86,5	93,2	100.000	13,5
		3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.377.500	4.377.500	4.010.000	91,6	93,2	367.500	8,4
		4	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.760.000	17.760.000	17.440.000	98,2	93,2	320.000	1,8
		5	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.800.000	5.800.000	3.400.000	58,6	93,2	2.400.000	41,4
		6	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.200.000	2.200.000	2.200.000	100,0	93,2	-	0,0
		7	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.800.000	8.800.000	1.011.100	11,5	93,2	7.788.900	88,5
		Sub Total			40.677.500	40.677.500	29.701.100	73,0	93,2	10.976.400
3	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.500.000	3.500.000	1.726.000	49,3	21,64	1.774.000	50,7
		2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	750.000	750.000	335.000	44,7	21,64	415.000	55,3
		3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.500.000	8.500.000	4.475.000	52,6	21,64	4.025.000	47,4
		4	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	61.050.000	61.050.000	7.991.000	13,1	21,64	53.059.000	86,9
		5	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	11.000.000	11.000.000	1.900.000	17,3	21,64	9.100.000	82,7
Sub Total			84.800.000	84.800.000	16.427.000	19,4	21,64	68.373.000	80,6	
4	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.000.000	2.000.000	-	0,0	0,0	2.000.000	100,0

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

		2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	750.000	750.000	-	0,0	0,0	750.000	100,0
		3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.500.000	7.500.000	5.287.500	70,5	70,5	2.212.500	29,5
		4	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	61.050.000	61.050.000	36.216.500	59,3	59,3	24.833.500	40,7
		5	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.200.000	8.200.000	3.400.000	41,5	41,5	4.800.000	58,5
		6	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8.000.000	8.000.000	8.000.000	100,0	100,0	0	0,0
		7	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.000.000	12.000.000	-	0,0	0,0	12.000.000	100,0
			Sub Total	99.500.000	99.500.000	52.904.000	53,2	53,8	46.596.000	46,8
5	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	1	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.682.500	6.682.500	6.075.000	90,9	90,9	607.500	9,1
		2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.500.000	2.500.000	2.500.000	100,0	100,0	-	0,0
		3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.707.500	4.707.500	4.450.000	94,5	94,5	257.500	5,5
		4	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	1.110.000	1.110.000	-	0,0	0	1.110.000	100,0
			Sub Total	15.000.000	15.000.000	13.025.000	86,8	90,9	1.975.000	13,2
6	Koordinas Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.485.000	1.485.000	-	0,0	0,0	1.485.000	100,0
		2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.500.000	3.500.000	2.000.000	57,1	57,1	1.500.000	42,9
		3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.480.000	1.480.000	640.000	43,2	43,2	840.000	56,8

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

			4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	29.750.000	134.750.000	911.000	3,1	3,1	133.839.000	96,9
			5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	33.300.000	77.700.000	27.432.800	82,4	82,4	50.267.200	17,6
			6	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	15.000.000	15.000.000	-	0,0	0,0	15.000.000	100,0
			7	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.000.000	10.000.000	3.600.000	72,0	72,0	6.400.000	28,0
			8	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	33.000.000	33.000.000	13.750.000	41,7	41,7	19.250.000	58,3
			9	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	79.200	79.200	33.000	41,7	41,7	46.200	58,3
			10	Belanja Iuran Kematian bagi Non ASN	99.000	99.000	41.250	41,7	41,7	57.750	58,3
			11	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	1.110.000	1.110.000	-	0,0	0,0	1.110.000	100,0
			12	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	75.000.000	120.600.000	29.691.000	39,6	39,6	90.909.000	60,4
				Sub Total	198.803.200	398.803.200	78.099.050	39,3	23,4	320.704.150	60,7
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah							
			1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.500.000	1.500.000	-	0,0	0,0	1.500.000	100,0
			2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	859.200	859.200	-	0,0	0,0	859.200	100,0
			3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.540.500	1.540.500	-	0,0	0,0	1.540.500	100,0
			4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	8.200.000	8.200.000	-	0,0	0,0	8.200.000	100,0

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

			5	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	65.600.000	65.600.000	-	0,0	0,0	65.600.000	100,0
			6	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	24.000.000	24.000.000	-	0,0	0,0	24.000.000	100,0
			7	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.000.000	2.000.000	-	0,0	0,0	2.000.000	100,0
			8	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	49.466.755	49.466.755	-	0,0	0,0	49.466.755	100,0
				Sub Total	153.166.455	153.166.455	-	0,0	0,0	153.166.455	100,0
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	1	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.782.000	1.782.000	540.000	30,3	30,3	1.242.000	69,7
			2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.000.000	2.000.000	-	0,0	0,0	2.000.000	100,0
			3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	596.000	596.000	-	0,0	0,0	596.000	100,0
			4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.500.000	10.500.000	-	0,0	0,0	10.500.000	100,0
			5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	7.200.000	13.650.000	-	0,0	0,0	7.200.000	100,0
			6	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0	0	-	0,0	0,0	0	100,0
			7	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.262.400	4.262.400	566.800	13,3	13,3	3.695.600	86,7
			8	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.200.000	3.200.000	-	0,0	0,0	3.200.000	100,0
			9	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	1.750.000	1.750.000	-	0,0	0,0	1.750.000	100,0

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

				10	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20.000.000	20.000.000	14.068.800	70,3	70,3	5.931.200	29,7	
					Sub Total	51.290.400	57.740.400	15.175.600	29,6	29,6	36.114.800	70,4	
			2	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.742.200	3.742.200	1.080.000	28,9	28,9	2.662.200	71,1
					2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.500.000	2.500.000	1.500.000	60,0	60,0	1.000.000	40,0
					3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.014.000	4.014.000	2.242.000	55,9	55,9	1.772.000	44,1
					4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	65.493.500	65.493.500	48.163.250	73,5	73,5	17.330.250	26,5
					5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	33.266.700	33.266.700	12.190.000	36,6	36,6	21.076.700	63,4
					6	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	12.750.000	16.750.000	2.550.000	20,0	20,0	10.200.000	80,0
					7	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6.000.000	6.000.000	2.000.000	33,3	33,3	4.000.000	66,7
					8	Belanja Sewa alat angkutan apung bermotor untuk Penumpang	1.500.000	1.500.000	-	0,0	0,0	1.500.000	100,0
					9	Belanja Perjalanan Dinas luar daerah	70.733.600	77.733.600	20.965.360	29,6	29,6	49.768.240	70,4
					Sub Total	200.000.000	210.500.000	90.690.610	45,3	47,1	109.309.390	54,7	
3	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1	Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	1	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	10.810.800	10.810.800	2.700.000	25,0	25,0	8.110.800	75,0
					2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.500.000	2.500.000	862.000	34,5	34,5	1.638.000	65,5
					3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.275.000	1.275.000	1.240.000	97,3	97,3	35.000	2,7

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

		Pembangunan Manusia	4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	400.000	590.500	360.000	90,0	90,0	230.500	10,0	
			5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.997.000	2.997.000	2.997.000	100,0	100,0	0	0,0	
			6	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	12.865.500	26.175.000	6.366.000	49,5	49,5	19.809.000	50,5	
			7	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	10.000.000	0	-	0,0	0,0	0	100,0	
			8	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	7.250.000	3.750.000	1.100.000	15,2	15,2	2.650.000	84,8	
				Sub Total	48.098.300	48.098.300	15.625.000	32,5	53,1	32.473.300	67,5	
	2	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.455.000	4.455.000	1.215.000	27,3	27,3	3.240.000	72,7	
			2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.500.000	2.500.000	-	0,0	0,0	2.500.000	100,0	
			3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.740.700	3.740.700	-	0,0	0,0	3.740.700	100,0	
			4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	16.350.300	16.350.300	-	0,0	0,0	16.350.300	100,0	
			5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	42.246.600	75.568.800	24.894.500	58,9	58,9	17.352.100	41,1	
			6	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	6.000.000	0	-	0,0	0,0	6.000.000	100,0	
			7	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	3.750.000	0	-	0,0	0,0	3.750.000	100,0	
			8	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	104.549.866	104.777.866	-	0,0	0,0	104.549.866	100,0	
				Sub Total	183.592.466	207.392.666	26.109.500	14,2	20,6	157.482.966	85,8	
	Koordinasi Perencanaan Bidang	1	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan	1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.775.000	2.775.000	2.000.000	72,1	72,1	775.000	27,9

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

		Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.056.164	2.056.164	567.000	27,6	27,6	1.489.164	72,4
					3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.033.075	3.033.075	1.999.000	65,9	65,9	1.034.075	34,1
					4	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.100.000	11.100.000	2.180.000	19,6	19,6	8.920.000	80,4
					5	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0	9.990.000	-	0,0	0,0	0	100,0
					6	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.625.000	5.625.000	1.800.000	32,0	32,0	3.825.000	68,0
					7	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	43.000.000	63.000.000	-	0,0	0,0	43.000.000	100,0
						Sub Total	67.589.239	97.579.239	8.546.000	12,6	12,6	59.043.239	87,4
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.500.000	2.500.000	1.559.000	62,4	62,4	941.000	37,6
					2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.346.652	1.346.652	1.206.000	89,6	89,6	140.652	10,4
					3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.130.200	3.130.200	-	0,0	0,0	3.130.200	100,0
					4	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.540.000	15.540.000	-	0,0	0,0	15.540.000	100,0
					5	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	28.000.000	43.000.000	11.851.331	42,3	42,3	16.148.669	57,7
						Sub Total	50.516.852	65.516.852	14.616.331	28,9	38,8	35.900.521	71,1
4	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	1	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.000.000	5.000.000	1.407.500	28,2	28,2	3.592.500	71,9
					2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.060.000	3.060.000	1.000.000	32,7	32,7	2.060.000	67,3

				3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	11.625.000	13.275.000	2.166.500	18,6	18,6	9.458.500	81,4
				4	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	53.280.000	46.620.000	-	0,0	0,0	53.280.000	100,0
				5	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	52.000.000	77.000.000	29.364.532	56,5	56,5	22.635.468	43,5
					Sub Total	124.965.000	144.955.000	33.938.532	27,2	27,2	91.026.468	72,8
					TOTAL KESELURUHAN	11.462.908.000	12.467.233.100	4.842.454.899	42,2	50,0	6.620.453.101	57,8

Meskipun terjadi pergeseran, di beberapa kegiatan pada Bappeda Kabupaten Belitung termasuk kegiatan rutin, total anggaran perubahan setelah di sandingkan dengan DPA induk 2024, perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 **Rp. 12.467.233.100,-** dari total Perencanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp. **11.462.908.000,-** jadi mengalami penambahan sebesar Rp. 1.004.325.100,- dari total DPA induk Tahun 2024

Berikut disampaikan gambaran Rencana Kerja dan Pendanaan setelah Perubahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 (Tabel 4) :

PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
 BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB. BELITUNG
 TAHUN 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
						Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah																13.220.798.782,00				
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	13.220.798.782,00			
	5 01					PERENCANAAN																	13.120.384.540,00			
1	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah Indeks profesionalitas ASN perangkat daerah				100 75 % %	100 75 % %	9.286.160.088,00	9.473.836.088,00	10.417.723.488,00								11.430.363.354,00			
	5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen hasil perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-					9 Dokumen	9 Dokumen	6.755.000,00	6.755.000,00	6.755.000,00							7.092.750,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																				
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2 Dokumen	2 Dokumen	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			1.470.000,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																				
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						1 Dokumen	1 Dokumen	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			1.102.500,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																				
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						1 Dokumen	1 Dokumen	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			1.102.500,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

5	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			1.102.500,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			1.102.500,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	1.155.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			1.212.750,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen keuangan perangkat daerah	-		2 Dokumen	2 Dokumen	7.197.993.600,00	7.435.521.600,00	7.435.521.600,00			-	-	-		8.750.680.977,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37 Orang/bulan	39 Orang/bulan	7.191.741.000,00	7.429.269.000,00	7.549.129.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			8.742.805.977,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	6.252.600,00	6.252.600,00	8.252.500,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			7.875.000,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah	-		8 Orang	8 Orang	152.161.488,00	152.161.488,00	152.161.488,00			-	-	-		318.465.000,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	20.535.000,00	20.535.000,00	20.535.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			24.255.000,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				30 Dokumen	1 Dokumen	30.200.000,00	30.200.000,00	50.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-					31.710.000,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																				
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				8 Orang	8 Orang	101.426.488,00	101.426.488,00	101.426.488,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-					262.500.000,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	-			100 %	100 %	957.529.600,00	957.529.600,00	957.529.600,00			-	-	-				1.007.699.652,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-					38.587.500,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	101.472.100,00	101.472.100,00	101.472.100,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-					106.548.908,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																				
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-					17.088.750,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	417.307.500,00	417.307.500,00	422.307.500,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-					438.173.194,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																				
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	78.750.000,00	78.750.000,00	78.750.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-					82.687.500,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																				

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkajene Lingsar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-				9.613.800,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	300.000.000,00	300.000.000,00	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-				315.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang milik daerah	-			5 Jenis	10 Jenis	142.500.000,00	142.500.000,00	142.500.000,00			-	-	Aparatur			695.415.000,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				-	15 Unit	0,00	0,00	40.515.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkajene Lingsar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-				57.330.000,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	41 Unit	142.500.000,00	142.500.000,00	745.812.500,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkajene Lingsar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-				638.085.000,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	-			100 %	100 %	420.297.400,00	420.297.400,00	420.297.400,00			-	-	-			431.502.225,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	4.050.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkajene Lingsar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-				4.257.225,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	184.000.000,00	184.000.000,00	184.000.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkajene Lingsar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-				196.245.000,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	232.247.400,00	232.247.400,00	232.247.400,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkajene Lingsar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-				231.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang milik daerah dalam kondisi baik	-			3 Jenis	3 Jenis	408.923.000,00	359.071.000,00	359.071.000,00														219.507.750,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																										
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				33 Unit	33 Unit	183.750.000,00	183.750.000,00	183.750.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-										192.937.500,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																										
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	40 Unit	25.250.000,00	25.250.000,00	78.450.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-											26.570.250,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																										
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	199.923.000,00	150.071.000,00	150.071.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-											0,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	
2	5	01	02		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase (%) kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan				100 %	100 %	1.514.310.055,00	1.514.310.055,00	1.485.967.555,00															1.322.617.757,00		
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah Kabupaten Belitung	-			3 Dokumen	4 Dokumen	1.109.853.200,00	1.109.853.200,00	1.109.853.200,00															760.750.000,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	01	02	2.01	0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah																										
						Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)				1 Dokumen	1 Dokumen	671.072.500,00	671.072.500,00	425.780.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan										0,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik																										
						Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				2 Berita Acara	2 Berita Acara	40.677.500,00	40.677.500,00	40.677.500,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan										35.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah																										

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

						Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				2 Berita Acara	2 Berita Acara	84.800.000,00	84.800.000,00	84.800.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkajene Lingseling	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			105.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				2 Berita Acara	2 Berita Acara	99.500.000,00	99.500.000,00	99.500.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			105.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02	2.01	0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan																	
						Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan				5 Usulan	5 Usulan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			15.750.000,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				2 Dokumen	3 Dokumen	198.803.200,00	198.803.200,00	398.803.200,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkajene Lingseling	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	-			1 Dokumen	1 Dokumen	153.166.455,00	153.166.455,00	153.166.455,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		206.814.778,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02	2.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah																	
						Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				82 Orang	82 Orang	153.166.455,00	153.166.455,00	153.166.455,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Paal Satu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			206.814.778,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	-			4 Dokumen	4 Dokumen	251.290.400,00	251.290.400,00	251.290.400,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		355.052.979,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

	5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota																
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				1 Laporan	1 Laporan	51.290.400,00	51.290.400,00	57.740.400,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			125.052.979,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah																
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				2 Laporan	2 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	210.500.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			230.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
3	5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase (%) kesesuaian program dokumen perencanaan perangkat daerah mitra bidang ekonomi dan sumber daya alam dengan program perencanaan pembangunan daerah			100 %	100 %	349.796.857,00	349.796.857,00	418.587.057,00							367.403.429,00	
	5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Laporan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	-		8 Laporan	8 Laporan	231.690.766,00	231.690.766,00	231.690.766,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		243.391.356,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				4 Laporan	4 Laporan	48.098.300,00	48.098.300,00	48.098.300,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			52.916.600,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia																
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				4 Laporan	4 Laporan	183.592.466,00	183.592.466,00	207.392.666,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			190.474.756,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Laporan koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-			1 Laporan	1 Laporan	67.589.239,00	67.589.239,00	67.589.239,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur		70.968.749,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA																	
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				1 Laporan	1 Laporan	67.589.239,00	67.589.239,00	97.579.239,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			70.968.749,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	-			1 Dokumen	1 Dokumen	50.516.852,00	50.516.852,00	50.516.852,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			53.043.324,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur																	
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	50.516.852,00	50.516.852,00	65.516.852,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			53.043.324,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							124.965.000,00	124.965.000,00	144.955.000,00						100.414.242,00		
4	5	05	02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Jumlah hasil kajian dan/atau kerjasama penelitian yang dilaksanakan				-	2 Dokumen	124.965.000,00	124.965.000,00	144.955.000,00							100.414.242,00	
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Laporan hasil inovasi dan teknologi	-			-	1 Laporan	124.965.000,00	124.965.000,00	124.965.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			100.414.242,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	05	02	2.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif																	
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				1 Laporan	1 Laporan	124.965.000,00	124.965.000,00	144.955.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			100.414.242,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
J U M L A H												11.275.232.000,00	11.462.908.000,00	12.467.233.100,00						13.220.798.782,00		

BAB IV PENUTUP

RENJA Perubahan Bappeda Kabupaten Belitung Tahun 2024, yang secara umum maupun secara khusus disusun sebagai acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi PD sekaligus ukuran keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas dan kegiatan-kegiatan serta program-program pembangunan yang dilakukan dan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Belitung Tahun 2024. Tingkat keberhasilan dalam pencapaian sasaran target yang ditetapkan akan menyesuaikan manakala anggaran yang dibutuhkan mengalami perubahan.

Pada dasarnya Renja Perubahan Bappeda Kabupaten Belitung dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda dalam bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

Sesuai aturan Renja Perubahan Bappeda Tahun 2024 dilakukan dengan merujuk pada dokumen Perubahan RKPD Tahun 2024. Dokumen perubahan disusun dengan memperhatikan keselarasan dengan seluruh Program dan Kegiatan dalam Dokumen Renstra Tahun 2024-2026, hal ini dilakukan agar seluruh isu dan permasalahan secara umum dapat diselesaikan dan seluruh target serta sasaran dapat tercapai dengan baik.

Selain itu Keberhasilan pelaksanaan Renja Perubahan Bappeda Kabupaten Belitung tahun 2024 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh Pegawai Bappeda Kabupaten Belitung dan diiringi peran aktif seluruh stakeholder pembangunan Kabupaten Belitung tanpa adanya kerjasama yang harmonis maka pencapaiannya tidak akan optimal.

Tanjungpandan, Agustus 2024

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN BELITUNG,**


NURMAN SUNANDA, SE
NIP. 19650805 199403 1 006